



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRA S. HEMETO, ST
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 532751

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.860.000.000
1. Tanah Seluas 17030 m2 di KAB / KOTA POHUWATO, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 19967 m2/7 m2 di KAB / KOTA BOALEMO, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 17480 m2/3 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
4. Tanah Seluas 19987 m2 di KAB / KOTA BOALEMO, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
5. Tanah Seluas 3401 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
6. Tanah Seluas 1700 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 2.650.000.000		
7. Tanah Seluas 19773 m2 di KAB / KOTA BOALEMO, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	650.000.000
1. MOBIL, WRANGLER JEEP WRANGLER 2.8 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTAHAPAN	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	36.586.096
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.546.586.096



III. HUTANG

Rp. 144.762.458

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.401.823.638

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.